

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 TAHUN 2025

LEMBAR UJI KONSEKUENSI



Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi telah dilakukan Pengujian Kosekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :

Informasi (berisi informasi yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Kosekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian kosekuensi pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data SP2D Pihak ke-3	UU No 14 Tahun 2018 pasal 17 huruf b	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Perlindungan usaha	Permanen
	PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3			
	UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31			
	Permendagri No. 77 Tahun 2020			
Daftar User dan Password Server/Aplikasi/IP Address Privat/Perangkat TIK	UU No 14 Tahun 2018 pasal 17 huruf b	Dapat mengungkap Perangkat Data	Keamanan Data	Permanen
	PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3			
	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37			
	Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016			
Source Code Aplikasi Khusus	PP PTSE No.82 Thn 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 b		Keamanan Data	Permanen
	UU No 14 Tahun 2018 pasal 17 huruf b			

permenkominfo..

	PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3	Dapat mengungkap Perangkat Data		
	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-70			
	Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016			
	PP PTSE No.82 Thn 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 b			
<p>Arsip Dinamis, Aktif dan Inaktif, yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen keuangan: <ul style="list-style-type: none"> - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otoritasnya - Surat pencairan anggaran 	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Penyediaan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum	Selama masih berlaku
	UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 1 dan 2			
	UU No 14 Tahun 2018 pasal 17 huruf b			
Data Kemiskinan Ekstrem	PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi orang	perlindungan data pribadi	Selama masih berlaku
	Perpres No.163 Tahun 2024			
	Inpres No.8 Tahun 2025			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Edwin Kristovianus, ST., MT	Sekretaris	BAPPEDA	
2	Albe Yulestian, S.STP,M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA	
3	Isnaini, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	BAPPEDA	
4	Bela Puspita Sari, A.Md.A.B	Arsiparis Terampil	BAPPEDA	
5	Deny Wahyudi	Pengadministrasi Perkantoran	BAPPEDA	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Silvani Utaran, S.STP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770628 199612 1 002